

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN**

2015 – 2022

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Syah Rizal
Nomor Mahasiswa : 18313237
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 –
2022**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Muhammad Syah Rizal
Nomor Induk Mahasiswa : 18313237
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE U11. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Penulis,



Muhammad Syah Rizal

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 –
2022

Nama : Muhammad Syah Rizal
Nim : 18313237
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 13 Juni 2023

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Telah menyetujui untuk diujikan

Rokhedi Priyo Santoso, S.E, MIDE

PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar
sarjana jenjang strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Nama : Muhammad Syah Rizal
Nim : 18313237
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Disahkan oleh

Pembimbing Skripsi : Rokhedi Priyo Santoso, S.E, MIDE
Penguji :

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur senantiasa kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan karunia-Nya serta kemudahan dan kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta Ayah dan Ibu atas kasih sayang, perhatian, dan doa yang tanpa henti diberikan untuk peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Muhammad Lutfi Hakim dan Adikku Rizka Annisa yang selalu memberi semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi Bapak Rokhedi Priyo Santoso, S.E, MIDEc selaku yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, saran, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman terdekat yang selalu memberikan masukan dan bantuan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberi penulis kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat 2000-2022**” . Dalam penyusunan ini penulis menyadari masih banyak memiliki kekurangan dalam keterbatasan, skripsi ini tidak akan pernah bisa selesai tanpa bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang hanya dengan berkat dan rahmat-Nya penelitian ini dapat selesai dengan lancar, baik dan tepat waktu.
2. Terimakasih kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan segala hal baik dunia maupun akhirat.
3. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu Ibu Musriah Achmadi dan Ayah Sodik Herdadi yang telah memberikan dukungan, doa, dan nasihat sehingga membuat saya bisa menyelesaikan kewajiban saya untuk menuntut Ilmu di Fakultas dan Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan saran sehingga bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto M.Si selaku dosen penguji yang sabar dalam menghadapi saya dan memberikan nasihat yang baik sebagai penulis.
6. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Abdul Hakim S.E, M.Ec., Ph.D. Ketua Prodi Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Terimakasih kepada Kakak dan Adik saya tercinta

9. Terimakasih kepada Indra Saputra S.E yang telah menjadi mentor penulis skripsi dengan baik dalam membantu saya menyelesaikan penelitian.
10. Teman-teman terbaik saya Darwis, Indra, Abdul, Rizky, Aufa, dan Prama yang selalu memberikan dukungan dan membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada semua Dosen FBE UII yang selama ini telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada penulis selama berkuliah di FBE UII, semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis.
12. Kepada staff dan karyawan FBE UII atas segala bantuan kepada penulis selama berkuliah di FBE UII.

Yogyakarta, 13 Juni 2023



Penulis,
Muhammad Syah Rizal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN UJIAN	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II	6
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Kajian Pustaka	6
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	9
2.2.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota.....	11
2.2.3 Pendidikan	12
2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto	12
2.2.5 Belanja Pemerintah Daerah.....	13
2.3 Hubungan Antara Variabel.....	14
2.3.1 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	14
2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	14
2.3.3 Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	15
2.3.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	15
2.4 Kerangka Pemikiran	15
2.5 Hipotesis Penelitian	16

BAB III	17
METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis dan cara pengumpulan data	17
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	17
3.2.1 Variabel Dependen.....	17
3.2.2 Variabel Independen.....	18
3.3 Metode Analisis.....	19
3.3.1 Common Effect Model.....	21
3.3.2 Fixed Effect Model	21
3.3.3 Random Effect Model.....	21
3.4 Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel	21
3.4.1 Uji Chow.....	22
3.4.2 Uji Hausman	22
3.4.3 Uji Langrange Multiplier.....	22
3.5 Pengujian Hipotesis.....	23
3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)	23
3.5.2 Koefisien Regresi Bersama (Uji F).....	23
3.5.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T)	23
BAB IV	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Deskripsi Data.....	25
4.2 PENGUJIAN MODEL REGRESI.....	26
4.2.1 Common Effect Model (CEM).....	26
4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)	27
4.2.3 Random Effect Model (REM).....	27
4.3 Hasil Pengujian Regresi.....	28
4.3.1 Uji Chow.....	28
4.3.2 Hasil Uji Hausman	29
4.4 Hasil Pengujian Statistik.....	30
4.4.1 Hasil Uji Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	30
4.5 ANALISIS REGRESI	31
4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)	31
4.5.2 Uji F.....	31

4.5.3 Uji t.....	31
4.6 INTERPRESTASI HASIL.....	32
4.6.1 Analisis Pengaruh Variabel Upah Minimum Kabupaten/ Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	32
4.6.2 Analisis Pengaruh Variabel Produk Domestik Regional Bruti (PDRB) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	34
4.6.3 Analisis Pengaruh Variabel Belanja Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	34
BAB V.....	36
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Implikasi.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	16
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Uji Statistik Diskriptif.....	25
Tabel 4. 2 Hasil Uji Common Effect Model.....	26
Tabel 4. 3 Hasil Uji Fixed Effect Model.....	27
Tabel 4. 4 Hasil Uji Random Effect Model.....	27
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow	29
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman.....	29
Tabel 4. 7 Hasil Regresi Fixed Effect Model	30

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi Jawa Barat 2015-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan adalah regresi data panel, yaitu berupa penggunaan data *time series* berupa data tahun 2015 sampai 2022, dan data *cross section* berupa data yang bersumber dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan model terbaik yaitu *fixed effect model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Upah minimum kabupaten/kota signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat, variabel rata-rata lama sekolah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat, variabel produk domestik regional bruto signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat dan variabel belanja pemerintah daerah tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat

Kata kunci: TPT, UMK, RLS, PDRB, Belanja Pemerintah Daerah

BAB I

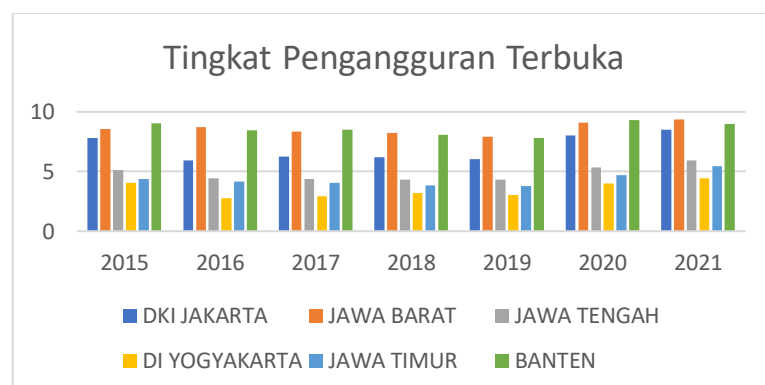
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi banyak negara berkembang salah satunya Indonesia adalah masalah pengangguran . Pengangguran termasuk salah satu permasalahan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah pengangguran dengan tepat dapat menyebabkan permasalahan baru . Munculnya pengangguran disuatu wilayah disebabkan oleh penambahan tenaga kerja baru yang lebih banyak dibandingkan dengan penambahan lapangan pekerjaan pada setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akan menimbulkan penawaran terhadap tenaga kerja semakin besar yang berakibat pada bertambahnya tingkat pengangguran.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pangguran terhadap jumlah angkatan kerja ataupun pekerja yang bekerja dibawah 35 jam per minggu. Pengangguran terdiri dari orang yang mencari kerja, orang yang tidak memiliki pekerjaan , yang sedang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari kerja dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Grafik 1. 1 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan Tingkat pengangguran terbuka tertinggi di pulau Jawa. Berdasarkan Grafik di atas, rata-rata tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2015-2021 di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,86 % kedua tertinggi di pulau Jawa. Sedangkan provinsi Banten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di pulau Jawa dengan rata-rata sebesar 9,13% , kemudian diikuti oleh provinsi DKI Jakarta sebesar 7,48%, Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata sebesar 5,07%, Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata sebesar 4,57% dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata sebesar 3,48%.

Pada Tahun 2020 peningkatan pengangguran tertinggi di Jawa Barat berada di Tahun 2020 dengan total pengangguran sebesar 10,46 %. Tingginya angka pengangguran di provinsi Jawa Barat disebabkan oleh beberapa, salah satunya adalah jumlah penduduk yang banyak dan pandemi covid 19 yang berdampak langsung terhadap sektor ketenagakerjaan formal, dan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tenaga kerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat sebesar 460.000 pekerja.

Faktor pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap pengangguran. Pendidikan dapat dilihat dari lama rata-rata sekolah di daerah tersebut. Pendidikan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kemampuan atau kualitas masyarakat. Di era global seperti saat ini persaingan tenaga kerja semakin ketat seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin tinggi juga. Banyaknya pengangguran dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan penduduk yang mereka jalani Bado dalam Husila (2019).

Faktor kedua yang juga memiliki kontribusi dalam menyebabkan naiknya jumlah pengangguran yaitu upah minimum, upah minimum didefinisikan sebagai upah ataupun imbalan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk dengan tunjangan bagi pekerja ataupun buruh beserta keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Adanya kebijakan penetapan upah minimum menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mencegah pekerja mendapatkan upah yang rendah

sehingga upah yang diterima tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Meskipun regulasi penetapan upah minimum akan menguntungkan pihak pekerja, namun disisi yang lain apabila upah yang ditetapkan pemerintah diatas upah yang semula diberikan kepada pekerja maka regulasi ini akan merugikan perusahaan karena kondisi ini mengharuskan perusahaan menambah pengeluaran produksi untuk membayar upah pekerja. Dengan kata lain regulasi penetapan upah minimum akan mempengaruhi perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja yang berakibat pada timbulnya pengangguran. Adanya tuntutan pekerja untuk memperoleh upah yang tinggi akan berakibat semakin tingginya biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan serta meningkatkan harga produknya. Sehingga akan berdampak pada penurunan permintaan konsumen dan pada akhirnya perusahaan akan mengurangi pekerja supaya perusahaan tetap efisiensi dan bertahan dipasar. Hal tersebut akan berakibat pada Meningkatnya pengangguran.(Soekapdjo & Oktavia, 2021)

Faktor selanjutnya yang berpengaruh yaitu belanja pemerintah daerah, desentralisasi fiskal memberikan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola serta penyusunan perencanaan anggaran ekonomi sesuai dengan kebutuhan serta kondisi didaerah tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengalokasikan anggaran salah satunya adalah belanja daerah dengan tujuan agar program pembangunan ekonomi yang sudah ada dapat terpenuhi dan terlaksana secara optimal serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah salah satunya dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya mengutamakan tujuan akhir pada output yang tumbuh, tetapi lebih kepada Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator salah satunya dengan turunnya angka pengangguran , kemiskinan , ketimpangan serta pemerataan pendidikan kesehatan dan ekonomi.(Safitri dkk., 2021)

Selanjutnya yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari kenaikan nilai produk domestik regional bruto yang dapat diartikan sebagai nilai tambah dari output yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi pada suatu daerah ataupun wilayah . semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin

baik perekonomian di daerah tersebut, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat berarti tingkat produksi dari barang dan jasa yang dihasilkan juga meningkat dan dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang banyak, sehingga jumlah pengangguran semakin menurun (Romhadhoni dkk., 2018)

Mengacu pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh Upah Minimum Kabupaten/kota pada tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022?
2. Adakah pengaruh Rata-rata lama sekolah pada tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022?
3. Adakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022?
4. Adakah pengaruh belanja pemerintah daerah pada tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambil peraturan yang sesuai untuk mengurangi pengangguran, termasuk di Provinsi Jawa Barat dan di Indonesia sehingga strategi-strategi yang dibuat oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan dapat menanggulangi pengangguran.
2. Memberi informasi yang dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi penelitian lain untuk menambah pengetahuan peneliti dalam menanggulangi pengangguran.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan terkait latar belakang, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada Bab ini menjelaskan terkait kajian pustaka yang berisi pengkajian dari hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, landasan teori, kerangka pemikiran serta hipotesis dalam penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada Bab ini terdapat Teknik dan cara pengumpulan data, definisi variabel operasional dalam penelitian, dan metode analisis.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini memaparkan deskripsi data penelitian, hasil analisis dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab ini menyajikan simpulan dan implikasi yang diambil peneliti dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi disaat melakukan penelitian. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut :

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil dan Analisis Penelitian
1.	Nurhayati & Satiti (2021) Analisis yang mempengaruhi Jumlah Pengangguran Jawa Barat Tahun 2017-2019	Variabel Belanja Daerah, Variabel Inflasi, Variabel UMK, Variabel PDRB, dan Tingkat Pengangguran Terbuka	Regresi Data Panel dan Model terbaik Fixed Effect	Variabel Belanja Daerah dan Variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Variabel Upah Minimum Kota/ Kabupaten berpengaruh negatif terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pengangguran.
2.	Cilviyani et al., (2019) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.	Variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Inflasi, Investasi dan	Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menghasilkan bahwa Variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Inflasi dan Investasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi sedangkan

		Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.
3.	Setiawan et al., (2017) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015.	Variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Variabel UMK, dan Tingkat Pengangguran Terbuka	Regresi Data Panel	Variabel Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur sedangkan Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.
4.	Siskawati et al., (2021) Pengaruh harapan lama Sekolah, rata-rata lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten / Kota Provinsi Riau.	Variabel rata-rata lama Sekolah, Harapan lama Sekolah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka	Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menghasilkan bahwa Variabel rata-rata lama Sekolah dan harapan lama Sekolah memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau,
5.	Husila (2019) Pengaruh rata-rata lama Sekolah, Inflasi	Variabel rata-rata lama Sekolah, Variabel inflasi,	Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menghasilkan bahwa Variabel rata-rata lama Sekolah berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran

	dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.	Variabel Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka		Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan, Variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan dan Variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan
6.	Nursafitri & Yudha (2020) Instrumen Moneter dan Belanja Daerah serta pengaruhnya terhadap Pengangguran Terbuka.	Variabel Inflasi, Variabel UMK, Variabel Perbankan, dan Tingkat Pengangguran	Regresi Data Panel	Penelitian ini menghasilkan bahwa Variabel Inflasi dan Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Variabel Penjamin Perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.
7.	Arizal & Marwan (2019) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Pengangguran di	Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Variabel PDRB	Ordinary Last Square	Penelitian ini menghasilkan bahwa Variabel Indeks Pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat dan Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

	Provinsi Sumatera Barat.			Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.
--	-----------------------------	--	--	---

Berdasarkan Tabel di atas yaitu kajian pustaka terdahulu, maka penulisan penelitian ini mengacu kepada penelitian Nurhayati & Satiti (2021) Analisis yang mempengaruhi Jumlah Pengangguran Jawa Barat Tahun 2017-2019. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel.

Pada penelitian ini variabel Y yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Variabel X nya adalah Variabel Belanja Daerah, Variabel Inflasi, Variabel UMK, dan Variabel PDRB yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka. Penulis memperbaharui penelitian dengan menambah Rata – rata Lama Sekolah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sadono Sukirno dalam Gatingsih dan Sutrisno (2017), pengangguran merupakan keadaan dimanan seseorang dalam golongan angkatan kerja yang ingin atau berusaha dalam mendapatkan pekerjaan namun belum mendapatkannya, atau juga dapat dikatakan bahwa pegangguran merupakan seorang dalam usia kerja dan sedang tidak bekerja atau sebelum pencacahan bekerja tetapi hanya dua hari dalam satu minggu dan sedang dalam proses mencari pekerjaan.

International Labor Organization atau ILO menyatakan bahwa pengangguran terbuka adalah orang yang sedang mencari kerja ,orang yang tidak memiliki pekerjaan , orang yang tidak memiliki pekerjaan dan orang yang tidak memiliki pekerjaan Dan seseorang yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai untuk bekerja (Handoyo, 2017).Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Dampak yang ditimbulkan akibat menganggur ini bisa berupa rendahnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan seseorang yang menganggur. Pengangguran yang berlarut-larut akan menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur ataupun keluarga dan lingkungan. Selain itu dengan pengangguran ini akan berdampak pula pada kekacauan

ekonomi, dimana dengan semakin turunnya nilai GNP serta pendapatan per orang. Menurut Gatningsih dan Sutrisno (2017), terdapat beberapa dampak yang timbul akibat pengangguran yaitu :

1. Menimbulkan kemiskinan, dengan menganggur maka seseorang tidak akan memiliki penghasilan sehingga akan menurunkan pendapatan dan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.
2. Semakin tingginya tindak pidana kriminal, seseorang yang menganggur dan terdesak akan kebutuhan hidup dapat melakukan tindakan kriminal seperti, mencopet, mencuri, atau bahkan melakukan pembunuhan
3. Naiknya jumlah anak jalanan, pengamen, pengemis, perdagangan anak dan sebagainya.
4. Terjadinya kekacauan politik dan sosial, seperti demonstrasi dan perebutan kekuasaan.
5. Terganggunya psikis seseorang,

Menurut Gatningsih dan Sutrisno (2017), terdapat beberapa jenis pengangguran yaitu:

1. Berdasarkan pada lama waktu kerja
 - a. Pengangguran terbuka,
Saat ini merupakan tenaga kerja yang menganggur, alasannya mungkin karena kurangnya pekerjaan atau ketidaksesuaian tugas dengan latar belakang Pendidikan atau pengetahuan.
 - b. Setengah pengangguran
Mewakili Angkatan kerja yang bekerja, tetapi penghasilan, jenis pekerjaan dan produktivitas tidak penuh yang diukur dengan jam kerja, atau pekerja bekerja kurang dari 35 jam per minggu.
 - c. Pengangguran terselubung
Mewakili Angkatan kerja yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan keahlian atau tingkat pendidikannya.
2. Pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya
 - a. Pengangguran structural

Merupakan pengangguran yang dapat diakibatkan karena terjadinya perubahan struktur ekonomi.

b. Pengangguran konjungtural

Dimana merupakan pengangguran yang dapat disebabkan karena adanya naik dan turun kegiatan perekonomian pada suatu Negara.

c. Pengangguran friksional

Memungkinkan pengangguran disebabkan oleh perpindahan pekerjaan yang ingin berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

d. Pengangguran musiman

Pengangguran yang mungkin disebabkan oleh perubahan musiman atau perubahan regular dalam permintaan tenaga kerja.

2.2.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 15 Tahun 2018 yang mengatur tentang upah minimum, terdapat 2 jenis upah minimum:

- a) Upah Minimum Provinsi merupakan besaran upah atau gaji terendah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya di suatu provinsi.
- b) Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan pada besaran upah atau gaji terendah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya dalam suatu kabupaten/kota.

Menurut (Lestari et al., 2022) Upah adalah imbalan atau penghargaan atas kinerja yang layak dan harus mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarga agar pekerja dapat fokus pada tugas yang diberikan kepadanya. Upah menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan motivasi kerja dan berdampak pada peningkatan produktivitas perusahaan. Penetapan upah minimum di suatu daerah atau kota sangat tergantung pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Meskipun pembahasannya diusulkan oleh bupati atau walikota, penetapan upah minimum dilakukan oleh gubernur. upah memiliki peran yang penting bagi pekerja dikarenakan

upah digunakan untuk membiaya hidup keluarga dan sebagai motivasi dalam meningkatkan produktivitas kerja.

Penetapan upah minimum kabupaten/kota memiliki tujuan untuk meningkatkan upah pekerja yang masih mendapatkan upah dibawah standar minimum gaji dan untuk melindungi pekerja dari pengusaha yang memberikan ulah di bawah standar. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam penetapan upah adalah tingkat inflasi di setiap wilayah.

2.2.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan dalam penyerapan pengetahuan untuk mengembangkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. BPS (2023) Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata rata jumlah tahun belajar penduduk umur 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Semakin tinggi rata rata lama sekolah menggambarkan semakin tinggi pendidikan formal yang telah dilalui oleh masyarakat pada suatu daerah dan semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dijalani.

Menurut teori human capital seseorang dapat meningkatkan penghasilan dan juga taraf hidupnya dengan meningkatkan tingkat pendidikannya. Menurut teori ini setiap kenaikan tahun ajaran di sekolah berarti juga meningkatkan produktivitas serta tingkat pendapatan, hal ini karena meningkatnya pendidikan seseorang dapat meningkatkan pendapatan seseorang pula. orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat diukur dengan lamanya waktu sekolah yang ditempuh. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan berpengaruh pada pekerjaan dan gaji yang akan dimilikinya dimana akan jauh lebih tinggi dibanding dengan yang tsingkat pendidikannya rendah (Putri dan Dewi, 2021).

2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto

Badan Pusat Statistik (2023) menjelaskan bahwa Produk regional bruto adalah nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan disuatu daerah akibat dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Produk domestik regional bruto

atas harga konstan menggambarkan nilai tambah pada barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara langsung. Sedangkan Produk domestik regional bruto digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi, pergerakan serta struktur ekonomi disuatu daerah.

Produk domestik regional bruto menggunakan tiga pendekatan , yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran

a.Pendekatan produksi

Produk domestik regional bruto dengan pendekatan produksi adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam suatu daerah pada priode waktu tertentu . biasaya tahunan.

b.Pendekatan Pendapatan

Produk domestik regional bruto dengan pendekatan pendapatan adalah total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi disuatu daerah pada jangka waktu tertentu. Biasanya tahunan.

c.Pendekatan Pengeluaran

Produk domestik regional bruto dengan pendekatan pengeluaran adalah jumlah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, swasta ataupun perusahaan, konsumsi pemerintah , pembentukan modal tetap domestik bruto , perubahan stok dan expor neto pada suatu daerah pada jangka waktu tertentu. Biasanya tahunan.

2.2.5 Belanja Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah merupakan semua pengeluaran yang bersumber dari rekening kas umum daerah dan mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah pada satu tahun anggaran yang tidak akan didapatkan kembali pada pembayaran oleh daerah. Kewenangan provinsi dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan urusan pemerintah yaitu berupa urusan wajib ataupun urusan pilihan serta urusan penanganan dalam bagian atau bidang tertentu serta dapat dilakukan secara bersama-sama antar

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Belanja pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan untuk masyarakat. Tujuan belanja pemerintah yaitu untuk menstabilkan harga, meningkatkan lapangan pekerjaan, kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

2.3 Hubungan Antara Variabel

2.3.1 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan serta ilmu pada masyarakat untuk dapat memiliki kehidupan yang lebih layak. Menurut Putri dan Dewi (2021), investasi dalam pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hal ini dapat terlihat dari meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin baik pula produktivitas yang didapatkan, sehingga kenaikan produktivitas ini maka masyarakat akan semakin baik dalam mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhannya. Tingkat pendidikan ini dapat diukur berdasarkan lama sekolah, sehingga masyarakat yang memiliki tingkat sekolah yang tinggi cenderung mendapatkan pekerjaan dibanding orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Sehingga dengan pendidikan yang tinggi tersebut dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran pada masyarakat.

2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Produk domestik regional bruto bertujuan mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan peningkatan perekonomian suatu daerah akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka dikarenakan dengan Meningkatnya produk domestik regional bruto akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan adakan menyebabkan permintaan tenaga kerja naik dan pengangguran akan turun sebaliknya jika produk domestik regional bruto turun akan mengurangi produksi sehingga mengurangi tenaga kerja dan akan berdampak pada meningkatnya pengangguran (Umar et al., 2020)

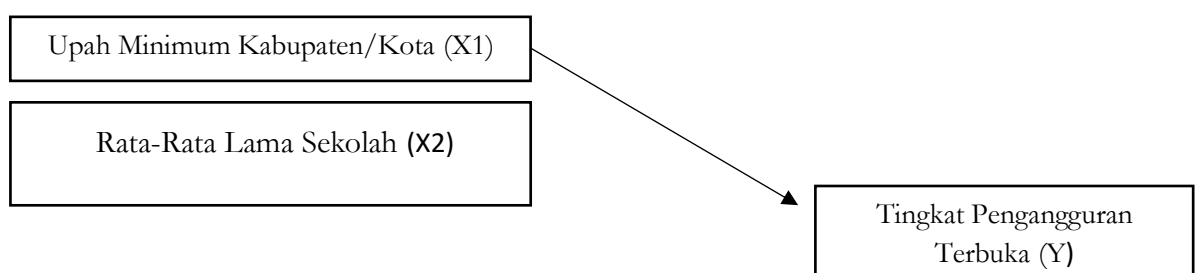
2.3.3 Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

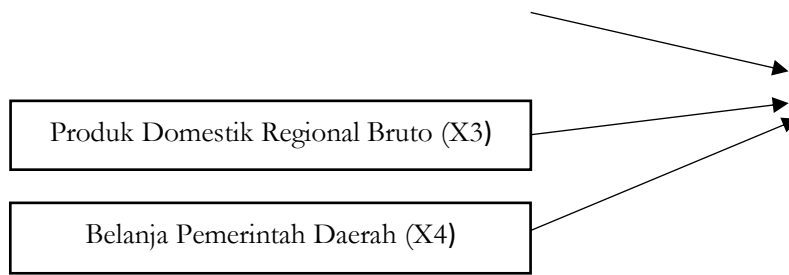
Belanja pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika belanja yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kenaikan maka akan mempermudah kegiatan perekonomian dan akan menciptakan multiplier effect yang akan berdampak langsung untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Belanja daerah digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, belanja pemerintah daerah digunakan untuk penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat akan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Peningkatan produktivitas masyarakat diharapkan akan mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Naza et al., 2020)

2.3.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Upah minimum kabupaten/kota menjadi tolak ukur dalam melihat perkembangan pada suatu daerah. Dengan tingginya upah minimum yang tinggi akan meningkatkan minat tenaga kerja untuk mencari kerja sedangkan bagi perusahaan upah minimum yang tinggi akan berdampak pada bertambahnya biaya produksi yang berakibat pada pengurangan tenaga kerja yang akan berdampak pada peningkatan pengangguran. Dapat disimpulkan bahwa upah minimum kabupaten/kota mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Menurut Guspika (2019), kebijakan upah minimum yang diterapkan pada sektor modern berupa sektor sekunder dan tersier. Kenaikan upah minimum ini juga terjadi setiap tahunnya, dan hal ini tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Apabila upah minimum yang ditetapkan melebihi dari tingkat upah pasar yang telah ditentukan oleh permintaan tenaga kerja, maka akan berdampak pada tingginya jumlah pekerja dibandingkan dengan jumlah pekerja yang diperlukan. Akibatnya, akan ada beberapa pekerja yang menganggur dan hal ini tentu akan semakin meningkatkan tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut.

2.4 Kerangka Pemikiran





Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Didapatkan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga upah minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022
2. Diduga rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022.
3. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022.
4. Diduga belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan cara pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis data panel dengan penggabungan data *Time Series* dan *Cross Section*. data yang digunakan dalam penelitian adalah data skunder. Pada penelitian ini data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. penelitian ini menggunakan data *time series* yaitu berupa data dari variabel Upah minimum Kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah, Produk domestik regional bruto dan belanja pemerintah daerah pada tahun 2015 -2022. Dan juga digunakan data *cross sectional* berupa data dari 27 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

1. Tingkat Pengangguran terbuka

Variabel	Definisi	Satuan	Sumber
Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)	Tingkat pengangguran terbuka merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang yang sedang	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

	menjadi pekerjaan, orang yang sedang menyiapkan sesuatu, orang yang tidak dapat bekerja, orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang yang sudah mendapat kerja tapi belum memulai bekerja.		
--	---	--	--

3.2.2 Variabel Independen

Variabel	Definisi	Satuan	Sumber
Upah Minimum Kabupaten/Kota (X1)	Upah minimum kabupaten/kota merupakan upah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja dan disesuaikan dengan produktivitas pekerjaan	Juta Rupiah	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Rata-Rata Lama Sekolah (X2)	Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah atau lama waktu (Tahun)	Tahun	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

	yang ditempuh masyarakat untuk menentukan kualitas pendidikan yang didapatkan oleh seseorang.		
Produk Domestik Regional Bruto (X3)	Produk domestik regional bruto merupakan total dari nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi di suatu wilayah.	Milliar Rupiah	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Belanja Pemerintah Daerah (X4)	Belanja pemerintah daerah merupakan belanja pemerintah dialokasikan terhadap pembangunan daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.	Milliar Rupiah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Alat yang dipakai mengolah data penelitian yaitu Eviews 12. Data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section* Studi ini mengambil data *time series*

seperti data tingkat pengangguran terbuka, Upah minimum kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah, Produk domestik regional bruto dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022.

Menurut Widarjono (2016), data panel memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan data cross section atau time series. Data panel menyajikan data yang lebih banyak sehingga degree of freedom yang dihasilkan lebih besar. Hal ini dikarenakan gabungan antara data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang muncul ketika variabel dihilangkan. Model yang digunakan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien regresi variabel independen
- X_1 = Upah Minimum Kabupaten/Kota (juta rupiah)
- X_2 = Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
- X_3 = Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah)
- X_4 = Belanja Pemerintah Daerah (Miliar rupiah)
- i = 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
- t = Tahun 2015-2022
- e = Komponen error

Diketahui perbedaan satuan dan besaran masing-masing variabel dalam persamaan regresi, model logaritma natural harus digunakan untuk membuatnya. Alasan pemilihan model log natural adalah sebagai berikut:

- A. Menghindari heteroskedastisitas
- B. Mengetahui koefisien yang mewakili elastisitas, dan,
- C. Dekatkan data ke skala.

Dalam model penelitian ini, logaritma yang digunakan berbentuk semi logaritma linier (semi logaritma). Semi-logaritma memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- Koefisien model semi-log memiliki interpretasi yang sederhana

- Model semi-log seringkali dapat mengurangi masalah statistik umum yang disebut heteroskedastisitas.

Model semi-log mudah dihitung. Oleh karena itu, persamaan penelitian model semi logaritma adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \text{LOG} \beta_1 X_{1it} + \text{LOG} \beta_2 X_{2it} + \text{LOG} \beta_3 X_{3it} + \text{LOG} \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.3.1 Common Effect Model

Common Effect Model merupakan model yang paling sederhana. Metode ini dikatakan sederhana karena hanya menggabungkan data time series dan cross section. Metode yang digunakan untuk mengestimasi model yaitu Ordinary Least Square (OLS). Adapun intersep pada masing-masing koefisien sama dalam model. Tidak hanya itu, slope koefisien dalam data cross section dan time series juga sama

3.3.2 Fixed Effect Model

Fixed Effect Model merupakan suatu model regresi data panel yang memperoleh intersep yang berbeda-beda pada setiap unit cross section. Akan tetapi slope koefisien masih sama. Estimasi model yang digunakan yaitu Least Square Dummy Variabel persamaan pada metode ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{1it} + \beta_6 D_{2it} + e_{it}$$

3.3.3 Random Effect Model

Random Effect Model merupakan model yang dapat mengurangi degree of freedom sehingga mengurangi efisien dari parameter yang di estimasi. Dalam model ini terdapat perbedaan intersep. Keuntungan dari model ini yaitu dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini disebut juga dengan Error Component Model (ECM). Adapun model random effect sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + v_{it} w_{1it} = e_{it} + u_i$$

3.4 Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Pada analisis regresi data panel memiliki 3 model yang digunakan common effect, fixed effect dan random effect Untuk memilih model yang tepat maka perlu pengujian yang harus dilakukan yaitu uji chow, uji hausman dan uji LM sebagai berikut:

3.4.1 Uji Chow

Uji chow berfungsi untuk menentukan model yang paling tepat antara common effect model atau fixed effect model. Berikut ini hipotesisnya :

H₀ : Common Effect Model

H₁ : Fixed Effect Model

Apabila nilai probabilitas lebih kecil ($<$) dari alpha maka menolak H₀. Sedangkan apabila nilai probabilitas lebih besar ($>$) dari alpha maka menerima H₀. dimana menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 %. Jika H₀ diterima maka model yang terbaik adalah Common Effect Model sebaliknya jika H₀ ditolak maka model yang terbaik adalah fixed effect model

3.4.2 Uji Hausman

Uji hausman berfungsi untuk menentukan model terbaik antara fixed effect model atau random effect model. Berikut ini hipotesisnya :

H₀ : Random Effect Model

H₁ : Fixed Effect Model

Apabila nilai probabilitas lebih kecil ($<$) dari alpha maka menolak H₀. Sedangkan apabila nilai probabilitas lebih besar ($>$) dari alpha maka menerima H₀. dimana menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 %. Jika H₀ diterima maka model yang terbaik adalah random effect model dan jika H₀ ditolak maka model yang terbaik adalah fixed effect model.

3.4.3 Uji Langrange Multiplier

Uji Langrange Multiplier merupakan pengujian yang berfungsi untuk menentukan model yang tepat antara Common Effect Model atau Random Effect Model. Berikut ini hipotesisnya:

H₀ : Common Effect Model

H₁ : Random Effect Model

Apabila nilai probabilitas lebih kecil ($<$) dari alpha maka menolak H₀. Sedangkan apabila nilai probabilitas lebih besar ($>$) dari alpha maka menerima H₀.

dimana menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 %. Jika H_0 diterima maka model yang terbaik adalah Common effect model dan jika H_0 ditolak maka model terbaiknya adalah random effect.

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi berfungsi mengukur persentase dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Apabila R^2 semakin besar maka memperjelas hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Apabila nilai R^2 kecil rendah maka tidak memperjelas hubungan antara variabel dependen dan variabel independen

3.5.2 Koefisien Regresi Bersama (Uji F).

Uji F digunakan untuk menunjukkan pengaruh antara variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 %. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka menerima hipotesis H_1 maka diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Ketika Menolak H_0 maka F hitung lebih kecil dari F tabel yang artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan..

Hipotesis untuk uji F sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen

terhadap variabel dependen secara simultan.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, yang artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3.5.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5%. Apabila nilai p value lebih kecil ($<$) dari alpha maka terdapat pengaruh antara variabel dependen

terhadap variabel independen. Namun apabila nilai F-value lebih besar(>) dari alpha tidak ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen

:

Hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran terbuka

H0 : $\beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran terbuka

H1 : $\beta > 0$, terdapat pengaruh positif antara Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran terbuka

2. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka.

H0 : $\beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Rata-Rata Lama Sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka

H1 : $\beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara Rata-Rata Lama Sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka.

H0 : $\beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka.

H1 : $\beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka.

4. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap tingkat kemiskinan.

H0 : $\beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Belanja Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengangguran terbuka..

H1 : $\beta > 0$, terdapat pengaruh positif antara Belanja Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengangguran terbuka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian terdiri dari Mean, median, minimum, maximum, standar deviasi dan observation. Berikut ini olahan data statistik deskriptif yang dapat diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Uji Statistik Diskriptif

Variabel	Mean	Median	Minimum	Maximum	Standar Deviasi	Observation
TPT	8.45	8.72	1.56	14.29	2.203072	216
UMK	2588258	2333878	1131862	4816921	932950.8	216
RLS	8.38	7.94	5.46	11.74	1.488463	216
PDRB	52665.12	30250.9	2624.24	265130.8	58438.94	216
BPD	3203.995	2931.525	724.39	9310.4	1607.113	216

Dari Tabel 4.1 diatas menunjukkan hasil dari variabel Tingkat Pengangguran Terbuka dengan observasi sebanyak 216, didapatkan nilai mean sebesar 8,45 % dan nilai median yaitu 8.72 %. Kemudian nilai minimum pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1.56% dan nilai maximum sebesar 14.29%. Kemudian nilai standar deviasi pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuk sebesar .2.203072.

pada variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan observasi sebanyak 216, didapatkan nilai mean sebesar Rp.2.588.258 dan nilai median yaitu Rp.2.333.878. Kemudian nilai minimum pada variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.131.862 dan nilai maximum sebesar Rp.4.816.921. Kemudian nilai standar deviasi pada variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar .932950.8

pada variabel Rata-Rata Lama Sekolah dengan observasi sebanyak 216, didapatkan nilai mean adalah 8.38 Tahun dan nilai median yaitu 7.94 Tahun . Kemudian nilai minimum pada variabel Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 5.46 Tahun dan nilai maximum sebesar 11.74 tahun. Kemudian nilai standar deviasi pada variabel Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 1.488463.

pada variabel Produk Domestik Regional Bruto dengan observasi sebanyak 216, didapatkan nilai mean sebesar 52665.12 (Milliar Rupiah) dan nilai median yaitu 30250.9 (Milliar Rupiah). Kemudian nilai minimum pada variabel Produk Domestik Regional Bruto sebesar 2624.24 (Milliar Rupiah) dan nilai maximum sebesar 265130.8 (Milliar Rupiah). Kemudian nilai standar deviasi pada variabel Produk Domestik Regional Bruto sebesar 58438.94.

pada variabel Belanja Pemerintah Daerah dengan observasi sebanyak 216, didapatkan nilai mean sebesar 3203.995 (Milliar Rupiah) dan nilai median yaitu 2931.525 (Milliar Rupiah). Kemudian nilai minimum pada variabel Belanja Pemerintah Daerah sebesar 724.39 (Milliar Rupiah) dan nilai maximum sebesar 9310.4 (Milliar Rupiah). Kemudian nilai standar deviasi pada variabel Belanja Pemerintah Daerah sebesar 1607.113.

4.2 PENGUJIAN MODEL REGRESI

4.2.1 Common Effect Model (CEM)

Tabel 4. 2 Hasil Uji Common Effect Model

Dependent Variable: TPT
Method: Panel Least Squares
Date: 06/13/23 Time: 11:11
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 213

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-30.10914	7.094427	-4.244055	0.0000
LOG(UMK)	2.974396	0.593604	5.010740	0.0000
LOG(RLS)	-1.404456	0.927538	-1.514177	0.1315
LOG(PDRB)	0.742047	0.327598	2.265116	0.0245
LOG(BPD)	-1.243759	0.522582	-2.380026	0.0182

Root MSE	1.815153	R-squared	0.295114
Mean dependent var	8.487042	Adjusted R-squared	0.281558
S.D. dependent var	2.167083	S.E. of regression	1.836840
Akaike info criterion	4.077165	Sum squared resid	701.7879
Schwarz criterion	4.156068	Log likelihood	-429.2180
Hannan-Quinn criter.	4.109052	F-statistic	21.77078
Durbin-Watson stat	0.467015	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : pengolahan Eviews 12

4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 4. 3 Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: TPT
Method: Panel Least Squares
Date: 06/13/23 Time: 11:40
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 216

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.23865	9.087253	1.566882	0.1189
LOG(UMK)	13.03966	1.781069	7.321256	0.0000
LOG(RLS)	-17.58849	4.109303	-4.280164	0.0000
LOG(PDRB)	-14.44995	2.688182	-5.375360	0.0000
LOG(BPD)	-1.284530	1.096427	-1.171560	0.2429

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.968391	R-squared	0.805885	
Mean dependent var	8.455694	Adjusted R-squared	0.774407	
S.D. dependent var	2.203072	S.E. of regression	1.046385	
Akaike info criterion	3.060674	Sum squared resid	202.5605	
Schwarz criterion	3.545089	Log likelihood	-299.5528	
Hannan-Quinn criter.	3.256379	F-statistic	25.60146	
Durbin-Watson stat	0.935850	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber : pengolahan Eviews 12

4.2.3 Random Effect Model (REM)

Tabel 4. 4 Hasil Uji Random Effect Model

Dependent Variable: TPT
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/13/23 Time: 11:43
 Sample: 2015 2022
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 216
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18.02124	6.046159	-2.980609	0.0032
LOG(UMK)	2.813503	0.711817	3.952563	0.0001
LOG(RLS)	-4.329484	1.965871	-2.202324	0.0287
LOG(PDRB)	0.868571	0.520207	1.669664	0.0965
LOG(BPD)	-1.860547	0.810202	-2.296400	0.0226

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.603210	0.7013
Idiosyncratic random		1.046385	0.2987

Weighted Statistics			
Root MSE	1.125592	R-squared	0.097789
Mean dependent var	1.901253	Adjusted R-squared	0.080685
S.D. dependent var	1.187776	S.E. of regression	1.138850
Sum squared resid	273.6628	F-statistic	5.717446
Durbin-Watson stat	1.191912	Prob(F-statistic)	0.000218

Unweighted Statistics			
R-squared	0.229072	Mean dependent var	8.455694
Sum squared resid	804.4698	Durbin-Watson stat	0.405462

Sumber : pengolahan Eviews 12

4.3 Hasil Pengujian Regresi

4.3.1 Uji Chow

Uji *Chow* merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model yang dipilih antara *fixed effect* model dan *random effect* model. Dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Memilih model Common Effect

Ha : Memilih model Fixed Effect

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: UJIHAUSMAN
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.852481	(26,185)	0.0000
Cross-section Chi-square	279.633716	26	0.0000

Sumber : pengolahan Eviews 12

Tabel 4.5 didapatkan nilai probabilitas cross-sectional F sebesar 0.0000 dan bernilai lebih kecil dibanding tingkat signifikan 0.05 ($0.0000 < 0.05$). dapat diputuskan bahwa menolak H_0 sehingga dapat dijelaskan bahwa model yang terpilih dalam penelitian ini adalah model estimasi fixed effect.

4.3.2 Hasil Uji Hausman

Dalam uji ini, dilakukan untuk menentukan model antara *fixed effect* atau *random effect*. Pada hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Memilih model Random Effect

H_a : Memilih model Fixed Effect

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	42.938253	4	0.0000

Sumber : pengolahan Eviews 12

Tabel 4.6 menunjukkan nilai probabilitas yaitu 0.0000 dan bernilai lebih kecil dibanding tingkat signifikan 0.05 ($0.0000 < 0.05$). dapat diputuskan bahwa menolak

H0 Sehingga dapat dijelaskan bahwa model yang terpilih dalam penelitian ini adalah model estimasi *fixed effect*.

4.4 Hasil Pengujian Statistik

4.4.1 Hasil Uji Regresi *Fixed Effect Model*

Setelah melakukan pemilihan model terbaik berdasarkan uji chow dan uji hausman, maka diperoleh hasil estimasi model terbaik yaitu menggunakan *fixed effect model* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: TPT
Method: Panel Least Squares
Date: 05/18/23 Time: 09:40
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 216

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.23865	9.087253	1.566882	0.1189
LOG(UMK)	13.03966	1.781069	7.321256	0.0000
LOG(RLS)	-17.58849	4.109303	-4.280164	0.0000
LOG(PDRB)	-14.44995	2.688182	-5.375360	0.0000
LOG(BPD)	-1.284530	1.096427	-1.171560	0.2429

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.968391	R-squared	0.805885
Mean dependent var	8.455694	Adjusted R-squared	0.774407
S.D. dependent var	2.203072	S.E. of regression	1.046385
Akaike info criterion	3.060674	Sum squared resid	202.5605
Schwarz criterion	3.545089	Log likelihood	-299.5528
Hannan-Quinn criter.	3.256379	F-statistic	25.60146
Durbin-Watson stat	0.935850	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : pengolahan Eviews 12

4.5 ANALISIS REGRESI

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji *fixed effect* didapatkan nilai koefisien determinan (R^2) yaitu yaitu 0.805885. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota, Rata-Rata Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Pemerintah Daerah mampu menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel dependen sebesar 80,58%. Sedangkan sisanya 19,42% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.5.2 Uji F

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% maka menolak H_0 . Maka Upah Minimum Kabupaten/Kota, Rata-Rata Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Pemerintah Daerah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Diprovinsi Jawa Barat.

4.5.3 Uji t

1. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota

Berdasarkan olah data model estimasi *fixed effect* yang telah dilakukan, dihasilkan nilai koefisien Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar 13.03966 dengan nilai t-hitung yaitu sebesar 7.321256. Didapatkan pula nilai probabilitas sebesar 0,0000 dan lebih kecil dari α 5% ($0,0000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa variabel UMK dapat berpengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

2. Variabel Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkan olah data model estimasi *fixed effect* yang telah dilakukan, dihasilkan nilai koefisien rata-rata lama sekolah sebesar -17.58849 , dengan nilai t-hitung yaitu sebesar -4.280164 . Didapatkan pula nilai probabilitas yaitu 0,0000 lebih rendah dari α 5% ($0,0000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa variabel rata-rata lama sekolah dapat berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

3. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan olah data model estimasi *fixed effect* yang telah dilakukan, dihasilkan nilai koefisien rata-rata lama sekolah sebesar -14.44995 ., dengan nilai t-hitung yaitu sebesar -5.375360 . Didapatkan pula nilai probabilitas yaitu 0,0000 lebih rendah dari α 5% ($0,0000 < 0,05$). Hal ini berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

4. Variabel Belanja Pemerintah Daerah

Berdasarkan olah data model estimasi *fixed effect* yang telah dilakukan, dihasilkan nilai koefisien Belanja Pemerintah Daerah sebesar -1.284530 dengan nilai t-hitung yaitu sebesar -1.171560 . Didapatkan pula nilai probabilitas sebesar 0.3913 dan lebih besar dari α 5% ($0.2429 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa variabel Belanja Pemerintah Daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

4.6 INTERPRESTASI HASIL

4.6.1 Analisis Pengaruh Variabel Upah Minimum Kabupaten/ Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan olah data model estimasi *fixed effect* yang telah dilakukan, dihasilkan nilai koefisien Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar $13.03966/100 = 0,1303966$ dengan nilai t-hitung yaitu sebesar 7.321256. Didapatkan pula nilai probabilitas sebesar 0,0000 dan lebih kecil dari α 5% ($0,0000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa variabel UMK dapat berpengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Dapat dijelaskan apabila variabel upah minimum kabupaten/kota naik 1 % rupiah maka variabel tingkat pengangguran terbuka naik 0.13 % Kenaikan ini disebabkan oleh upah minimum kabupaten/kota yang mengakibatkan biaya produksi semakin tinggi. Hal ini justru berdampak buruk bagi perusahaan dikarenakan efisiensi pengeluaran menjadi berkurang dan Pengusaha akan mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja agar biaya produksi berkurang. Akibatnya perusahaan secara tidak langsung harus melakukan PHK dan pengangguran akan meningkat.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Rahmawati,2017) menjelaskan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota, kenaikan UMK membuat perusahaan akan lebih selektif dalam menerima calon pekerja . perusahaan akan lebih memilih pekerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik sehingga bagi angkatan kerja yang memiliki pendidikan tinggi namun bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang berakibatkan jumlah pengangguran menjadi naik. Selain itu penelitian ini didukung oleh (Pamungkas & Suman, 2017) peningkatan tingkat pengangguran diakibatkan oleh tinggi upah yang mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja.

4.6.2 Analisis Pengaruh Variabel Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran terbuka

Berdasarkan olah data model estimasi *fixed effect* yang telah dilakukan, dihasilkan nilai koefisien rata-rata lama sekolah sebesar $-17.58849/100 = -0,1758849$, dengan nilai t-hitung yaitu sebesar -4.280164 . Didapatkan pula nilai probabilitas yaitu 0,0000 lebih rendah dari α 5% ($0,0000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa variabel rata-rata lama sekolah dapat berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Dapat dijelaskan apabila variabel Rata-rata lama sekolah naik 1 % maka variabel tingkat pengangguran terbuka akan turun 0,17 %. rata-rata lama sekolah bisa menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tingginya kualitas pendidikan seseorang maka dalam bersaing untuk mendapatkan pekerjaan juga akan semakin mudah. Semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah maka akan berdampak baik bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan sehingga pengangguran akan mengalami penurunan..

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Johar et al., 2023) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Semakin tinggi rata lama sekolah atau pendidikan maka semakin berpeluang masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Selain itu penelitian ini didukung oleh (Sosial et al., 2022) menyatakan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara rata-rata lama sekolah terhadap tingkat

pengangguran yaitu setiap kenaikan tingkat rata-rata lama sekolah akan menurunkan tingkat pengangguran.

4.6.3 Analisis Pengaruh Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan olah data model estimasi *fixed effect* yang telah dilakukan, dihasilkan nilai koefisien rata-rata lama sekolah sebesar $-14.44995/100 = -0,1444995$, dengan nilai t-hitung yaitu sebesar -5.375360 . Didapatkan pula nilai probabilitas yaitu $0,0000$ lebih rendah dari $\alpha 5\%$ ($0,0000 < 0,05$). Hal ini berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Dapat dijelaskan apabila variabel apabila Produk Domestik Regional Bruto naik 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan turun sebesar $0,14\%$. Peningkatan yang terjadi terhadap PDRB mengakibatkan kenaikan pada produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa mengakibatkan permintaan kerja juga menjadi naik dengan naiknya permintaan kerja ini menyebabkan tingkat pengangguran menurun. Berlaku sebaliknya apabila PDRB mengalami penurunan maka produksi juga menurun, permintaan tenaga kerja menjadi turun dan tingkat pengangguran akan meningkat.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Barat & Laksamana, 2016) menjelaskan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran , hal ini disebabkan bertambahnya nilai PDRB mampu menyerap tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran. Selain itu penelitian ini didukung oleh (Sari Silaban et al., 2020) dengan hasil penelitian variabel PDRB signifikan dan berkofisien negatif artinya terjadi hubungan negatif antara PRDB dengan pengangguran, semakin tinggi PDRB maka terjadi kenaikan hasil produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja menjadi naik maka mengurangi jumlah pengangguran.

4.6.4 Analisis Pengaruh Variabel Belanja Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan olah data model estimasi *fixed effect* yang telah dilakukan, dihasilkan nilai koefisien Belanja Pemerintah Daerah sebesar $-1.284530/100 = -0,0128453$

dengan nilai t-hitung yaitu sebesar -1.171560 .Didapatkan pula nilai probabilitas sebesar 0.3913 dan lebih besar dari α 5% ($0.2429 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa variabel Belanja Pemerintah Daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Belanja pemerintah daerah di Jawa Barat masih belum bisa berjalan secara optimal dalam penyediaan infrastruktur guna pembangunan daerah. Dengan masih tidak optimalnya belanja daerah tersebut mengurangi minat investor untuk berinvestasi tersebut sehingga menghambat perekonomian di daerah tersebut tidak berkembang, dengan tidak berkembangnya perekonomian di daerah tersebut maka akan menambah jumlah pengangguran (Tumbel et al., 2021).

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Mariyana, 2017) menjelaskan bahwa variabel belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Selain itu penelitian ini didukung oleh (Tumbel et al. 2021) Variabel belanja pemerintah daerah tidak signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka, Artinya tidak ada hubungan linier antara Variabel Independen Belanja pemerintah terhadap Variabel Dependen pengangguran

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

1. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022. ketika adanya peningkatan pada UMK maka akan berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel rata-rata lama sekolah dapat berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022. ketika terjadi kenaikan rata-rata lama sekolah maka akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022. ketika terjadi peningkatan PDRB maka akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
4. Variabel Belanja Pemerintah Daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

5.2 Implikasi

1. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022. Pemerintah diharapkan bisa menjadi penengah yang baik antara buruh pekerja dan perusahaan dalam menetapkan upah minimum agar menarik minat pekerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Upah yang terlalu rendah dapat merugikan karyawan, dan upah

minimum yang terlalu tinggi dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah yang tidak hanya menjadi beban atau keuntungan bagi satu pihak saja. Sehingga upah yang ditetapkan dapat dipergunakan dengan semestinya sehingga tidak menguntungkan salah satu pihak

2. Variabel rata-rata lama sekolah dapat berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022. Untuk mengurangi pengangguran terbuka, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta menciptakan peningkatan keahlian maupun keterampilan. Sehingga dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah serta meningkatkan skill yang dapat membantu para pekerja untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan.
3. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022. Peningkatan PDRB akan terus dibutuhkan, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Sehingga hal ini akan menurunkan tingkat pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

Widarjono, A. (2016). *Ekonomika Pengantar dan Aplikasi Edisi 4*. In Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Laksamana, R. (2016). *PENGARUH PDRB TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA* (Vol. 5, Issue 2).

Sari Silaban, P. M., Permata Sari Br Sembiring, I., & Alvionita Br Sitepu, V. (2020). *Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019*.

Sosial, A. J., Humaniora, D., Mustakim, A., Halu, U., Ferlin, O., Rizal, O., & Oleo, U. H. (2022). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kendari Tahun. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 209–216. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

johar, M. R., Suharno, & Istiqomah. (2023). *Hubungan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka : Mediasi Laju Pertumbuhan Ekonomi* (Vol. 1).

Mariyana, M. (2017). Pengaruh belanja daerah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan* ... <https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/4184>

Rahmawati, F. N. (2017). *analaisis pengaruh pdrb, umk, dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap jumlah pengangguran terdidik di d.i yogyakarta*.

Pamungkas, P. A., & Suman, A. (2017). *pengaruh upah minimum terhadap pengangguran dan kemiskinan di indonesia tahun 2011-2016*.

Tumbel, S. D. A., Koleangan, R. A. M., & ... (2021). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap

Pengangguran Di Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32717>

- Nurhayati, S. F., & Saiti, T. T. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019. *Skripsi*, 1–14.
- Sirait, A. F., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 137–146.
<https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i3.5512>
- Setiawan, J., Saleh, M., & Yuliati, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015. *Journal Ekuilibrium*, II(1), 31–37.
- Siskawati, N., Surya, R. Z., & Sudeska, E. (2021). *pengaruh harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten / kota provinsi riau.*
- Husila, susi. (2019). *analisis pengaruh inflasi, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di provinsi sulawesi selatan.*
- Nursafitri, S., & Yudha, A. T. R. C. (2020). Instrumen Moneter Dan Belanja Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pengangguran Terbuka. *Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 121–136. <https://doi.org/10.35590/jeb.v7i2.2111>
- Arizal, M., & Marwan, M. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433.
<https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7414>
- PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN. (2018). *PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 15 Tahun 2018 TENTANG UPAH MINIMUM.*
- Lestari, D., Nainggolan, P., & Damanik, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Upah Minimum Kabupaten / Kota Terhadap Inflasi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 27–36.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.334>

Putri, E. M dan Dewi. (2021). *Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 10 (2)

Albab Al Umar, A. U., Lorenza, L., Nur Savitri, A. S., Widayanti, H., & Lutfi Mustofa, M. T. (2020). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Jurnal Ekonomi Balance*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.26618/jeb.v16i1.3292>

Naza, D. A. A., Rahmadi, S., & Rosmeli, R. (2020). Analisis belanja daerah menurut urusan dan hubungannya terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 101–108. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v9i2.12483>

Guspika. (2019). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Gatiningsih dan Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Jawa Barat, Alqaprint

Handoyo, R. D. (2017). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Putra Merdeka

Putri, E. M dan Dewi. (2021). *Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 10 (2)

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 94–102. <https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10070>

Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). *INDONESIAN TREASURY REVIEW ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF JAWA TIMUR* Ferry Prasetyia.

LAMPIRAN

Tahun	kabupaten/kota	TPT	UMK	RLS	PDRB	BPD
2015	Bogor	10,01	2590000	7,75	124486,98	5638,2
2016	Bogor	9,78	2960325	7,83	131760,37	6465,3
2017	Bogor	9,55	3204552	7,84	139561,45	6875,74
2018	Bogor	9,83	3557146	7,88	148203,35	7305,06
2019	Bogor	9,11	3763406	8,29	156876,01	7771,22
2020	Bogor	14,29	4083670	8,3	154113,6	8405,49
2021	Bogor	12,22	4217206	8,31	159582,65	8708,39
2022	Bogor	10,64	4217206	8,48	167966,18	9310,4
2015	Sukabumi	10,05	1940000	6,51	37265,25	3204,59
2016	Sukabumi	8,86	2195435	6,74	39447,01	3388,58
2017	Sukabumi	7,66	2376558	6,79	41716,23	3674,93
2018	Sukabumi	7,84	2583556	6,8	44140,89	3824,21
2019	Sukabumi	8,05	2791016	7,02	46628,34	4081,69
2020	Sukabumi	9,6	3028531	7,07	46199,31	4027,84
2021	Sukabumi	9,51	3125444	7,1	47933,52	4059,03
2022	Sukabumi	7,77	3125444	7,33	50388,72	4057,58
2015	Cianjur	10,06	1600000	6,54	25352,13	3050,24
2016	Cianjur	10,08	1837520	6,61	26981,37	3379,49
2017	Cianjur	10,1	1989115	6,92	28538,99	3664,12

2018	Cianjur	10,23	2162366	6,93	30320,21	4000,99
2019	Cianjur	9,81	2336004	6,97	32039,32	3935,27
2020	Cianjur	11,05	2534789	7,18	31790,76	3907,92
2021	Cianjur	9,32	2699814	7,19	32897,52	3901,61
2022	Cianjur	8,41	2699814	7,12	34556,4	3993,19
2015	Bandung	4,03	2001195	8,41	64701,52	4607,33
2016	Bandung	3,98	2257715	8,5	68804,85	4640,19
2017	Bandung	3,92	2463461	8,51	73039,45	4911,94
2018	Bandung	5,07	2678028	8,58	77613,22	5114,9
2019	Bandung	5,51	2893074	8,79	82547,44	5782,09
2020	Bandung	8,58	3139275	8,96	81059,06	5467,22
2021	Bandung	8,32	3241929	9,07	83947,15	5498,61
2022	Bandung	6,98	3241929	9,07	88437,96	5206,19
2015	Garut	6,5	1250000	6,84	31919,06	3549,25
2016	Garut	7,18	1421625	6,88	33803,54	3691,52
2017	Garut	7,86	1538909	7,28	35464,91	4369,93
2018	Garut	7,12	1672947	7,5	37225,15	4257,22
2019	Garut	7,35	1807285	7,51	39092,49	4594,61
2020	Garut	8,95	1961085	7,52	38598,43	4573,91
2021	Garut	8,68	1961085	7,53	39981,19	4649,6
2022	Garut	7,6	1975220	7,77	42012,96	4688,42
2015	Tasikmalaya	8,51	1435000	6,88	19662,49	2736,27
2016	Tasikmalaya	7,56	1632360	6,94	20824,8	3340,09
2017	Tasikmalaya	6,61	1767686	7,12	22063,29	3410,28
2018	Tasikmalaya	6,92	1920937	7,13	23320,61	3463,24
2019	Tasikmalaya	6,31	2075189	7,17	24586,67	3794,19
2020	Tasikmalaya	7,12	2251787	7,35	24344,86	3687,57
2021	Tasikmalaya	6,16	2251787	7,48	25179,48	3163,52
2022	Tasikmalaya	4,17	2326772	7,75	26361,66	3171,35
2015	Ciamis	6,99	1131862	7,45	17779,91	2319,08
2016	Ciamis	6,08	1363319	7,55	18844,97	2460,81
2017	Ciamis	5,17	1475792	7,59	19826,75	2526,06
2018	Ciamis	4,64	1604334	7,6	20878,69	2602,92
2019	Ciamis	5,16	1733162	7,69	22001,24	2692,64
2020	Ciamis	5,66	1880654	7,7	21970,41	2666,32
2021	Ciamis	5,06	1880654	7,9	22774,93	2706,1
2022	Ciamis	3,75	1897867	8,02	23918,89	2798,75
2015	Kuningan	7,49	1206000	7,2	13175,67	2353,04
2016	Kuningan	7,72	1364760	7,34	13977,77	2500,02
2017	Kuningan	7,94	1477352	7,35	14866,62	2629,54
2018	Kuningan	9,1	1606030	7,36	15821,96	2508,51

2019	Kuningan	9,68	1734994	7,38	16864,15	2650,61
2020	Kuningan	11,22	1882642	7,57	16882,76	2795,8
2021	Kuningan	11,68	1882642	7,8	17483,56	2742,15
2022	Kuningan	9,81	1908102	7,88	18450,34	2677,33
2015	Cirebon	10,51	1400000	6,32	27596,25	2987,08
2016	Cirebon	10,06	1592220	6,41	29149,31	3419,43
2017	Cirebon	9,61	1723578	6,61	30623,31	3598,09
2018	Cirebon	10,64	1873701	6,62	32161,84	3681,47
2019	Cirebon	10,35	2024160	6,71	33668,1	4025,76
2020	Cirebon	11,52	2196416	6,92	33304,05	3694,21
2021	Cirebon	10,38	2269556	7,1	34127,52	3942,81
2022	Cirebon	8,11	2279982	7,39	35523,78	3993,08
2015	Majalengka	4,01	1245000	6,8	16590,93	2388,97
2016	Majalengka	4,52	1409360	6,89	17591,79	2633,58
2017	Majalengka	5,02	1525632	6,9	18789,49	2638,83
2018	Majalengka	5	1653514	6,91	20006,88	2791,92
2019	Majalengka	4,37	1791693	7,09	21561,72	3013,04
2020	Majalengka	5,84	1944166	7,27	21754,54	3225,17
2021	Majalengka	5,71	2009000	7,31	22788,75	3105,9
2022	Majalengka	4,16	2027619	7,43	24300,77	2989,81
2015	Sumedang	9	2001195	7,66	18950,36	2352,85
2016	Sumedang	8,08	2275715	7,72	20029,72	2510,9
2017	Sumedang	7,15	2463461	7,98	21276,7	2622,49
2018	Sumedang	7,54	2678028	8,17	22507,96	2690,09
2019	Sumedang	7,7	2893074	8,27	23932,73	3022,62
2020	Sumedang	9,89	3139275	8,51	23665,01	2868,27
2021	Sumedang	9,18	3241929	8,52	24414,66	2712,13
2022	Sumedang	7,72	3241929	8,69	25641,85	2930,91
2015	Indramayu	8,51	1465000	5,46	56663,3	2880,74
2016	Indramayu	8,58	1665810	5,56	56706,18	3218,21
2017	Indramayu	8,64	1803239	5,97	57515,01	3304,47
2018	Indramayu	8,46	1960301	5,98	58287,98	3250,49
2019	Indramayu	8,35	2117713	5,99	60153,18	3751,43
2020	Indramayu	9,21	2297931	6,3	59200	3312,2
2021	Indramayu	8,3	2373073	6,52	59544,87	3257,42
2022	Indramayu	6,49	2391567	6,8	61259,61	3197,44
2015	Subang	10,04	1900000	6,45	23696,76	2303,49
2016	Subang	9,39	2149720	6,58	24976,92	2629,61
2017	Subang	8,74	2327072	6,83	26250,72	2954,07
2018	Subang	8,71	2529759	6,84	27408,2	2932,14
2019	Subang	8,68	2732899	6,85	28672,9	3053,7

2020	Subang	9,48	2965468	7,1	28344,32	2906,51
2021	Subang	9,77	3064218	7,11	28960,89	3120,31
2022	Subang	7,77	3064218	7,24	30181,58	2731,5
2015	Purwakarta	10	2600000	7,35	37899,02	1803,28
2016	Purwakarta	9,56	2927990	7,42	40169,9	1794,16
2017	Purwakarta	9,11	3169549	7,74	42239,3	2023,9
2018	Purwakarta	9,94	3445616	7,75	44341,65	1920,11
2019	Purwakarta	9,73	3722299	7,92	46278,21	2280,99
2020	Purwakarta	11,07	4039067	8,09	45293,24	2184,78
2021	Purwakarta	10,7	4173568	8,1	46840,15	2397,79
2022	Purwakarta	8,75	4173568	8,23	49293,37	2242,04
2015	Karawang	11,51	2957450	6,81	132453,57	2553,62
2016	Karawang	10,53	3330505	6,94	141125,54	3716,16
2017	Karawang	9,55	3605272	7,34	148358,44	4146,86
2018	Karawang	9,12	3919291	7,35	157317,84	4315,27
2019	Karawang	9,68	4234010	7,65	163946,85	4672,95
2020	Karawang	11,52	4594324	7,77	157710,59	4169,18
2021	Karawang	11,83	4793312	7,78	166941,49	4670,67
2022	Karawang	9,87	4798312	7,82	177470,89	4806,76
2015	Bekasi	10,03	2840000	8,66	205950,39	4217,38
2016	Bekasi	10,5	3261375	8,81	215928,36	4899,02
2017	Bekasi	10,97	3530438	8,82	228203,6	4846,11
2018	Bekasi	9,74	3837939	8,84	241949,38	5057,7
2019	Bekasi	9	4146126	8,84	251502,79	5547,6
2020	Bekasi	11,54	4498961	9,12	242971,39	5479,34
2021	Bekasi	10,09	4791843	9,3	251778,52	6192,2
2022	Bekasi	10,31	4791843	9,43	265130,82	6169,83
2015	Bandung Barat	10,01	2004637	7,53	25486,17	2077,33
2016	Bandung Barat	9,67	2280175	7,63	26925,88	2313,02
2017	Bandung Barat	9,33	2468289	7,74	28330,02	2581,92
2018	Bandung Barat	8,55	2683277	7,97	29888,89	2643,9
2019	Bandung Barat	8,24	2898744	8,18	31398,35	2940,99
2020	Bandung Barat	12,25	3145427	8,19	30640,41	2678,14
2021	Bandung Barat	11,65	3248283	8,2	31701,79	2917,75
2022	Bandung Barat	9,63	3272668	8,29	33393,29	2899,71
2015	Pangandaran	4,81	1165000	7,06	6271,1	1029,96
2016	Pangandaran	4,08	1324620	7,07	6602,73	978,87
2017	Pangandaran	3,34	1433901	7,37	6939,64	1307,76
2018	Pangandaran	3,59	1558793	7,58	7308,73	1161,65
2019	Pangandaran	4,52	1714673	7,67	7742,87	1461,49
2020	Pangandaran	5,08	1860591	7,74	7738,97	1565,84

2021	Pangandaran	3,25	1860591	7,85	8022,78	1349,23
2022	Pangandaran	1,56	1884364	8,06	8426,4	1446,94
2015	Kota Bogor	11,08	2658155	10,2	25298,6	1862,98
2016	Kota Bogor	10,33	3022765	10,3	27002,25	2115,3
2017	Kota Bogor	9,57	3272143	10,3	28654,97	2245,59
2018	Kota Bogor	9,74	3557146	10,3	30413,57	2406,59
2019	Kota Bogor	9,16	3842785	10,3	32295,73	2528,44
2020	Kota Bogor	12,68	4169806	10,3	32162,74	2354,87
2021	Kota Bogor	11,79	4169806	10,5	33372,48	2637,73
2022	Kota Bogor	10,78	4330249	10,6	35258,87	2936,45
2015	Kota Sukabumi	9,06	1572000	9,08	6985,33	1057,84
2016	Kota Sukabumi	8,53	1834175	9,28	7379,48	1155,74
2017	Kota Sukabumi	8	1985494	9,52	7780,42	1160,22
2018	Kota Sukabumi	8,57	2158430	9,53	8209,92	1185,87
2019	Kota Sukabumi	8,49	2331752	9,58	8664,02	1308,07
2020	Kota Sukabumi	12,17	2530183	9,67	8534,72	1202,03
2021	Kota Sukabumi	10,78	2530183	9,91	8851,05	1201,05
2022	Kota Sukabumi	8,83	2562434	10,2	9324,16	1255,82
2015	Kota Bandung	9,02	2310000	10,5	149580,38	5201,94
2016	Kota Bandung	8,73	2626940	10,6	161227,83	5830,41
2017	Kota Bandung	8,44	2843662	10,6	172851,96	5541,72
2018	Kota Bandung	8,05	3091345	10,6	185084,18	6114,45
2019	Kota Bandung	8,18	3339580	10,7	197642,89	6312,15
2020	Kota Bandung	11,19	3623779	10,8	193144,95	5407,13
2021	Kota Bandung	11,46	3742276	11	200414,03	5675,6
2022	Kota Bandung	9,55	3774860	11	211249,37	6473,48
2015	Kota Cirebon	11,28	1415000	9,76	13269,24	1354,73
2016	Kota Cirebon	10,29	1592220	9,87	14077,05	1463,44
2017	Kota Cirebon	9,29	1741682	9,88	14893,14	1409,42
2018	Kota Cirebon	9,07	1893383	9,89	15817,18	1426,05
2019	Kota Cirebon	9,04	2045422	9,9	16812,49	1587,3
2020	Kota Cirebon	10,97	2219488	9,91	16648,21	1582,88
2021	Kota Cirebon	10,53	2271202	10,1	17155,75	1334,56
2022	Kota Cirebon	8,42	2304943	10,3	18030,25	1433,79
2015	Kota Bekasi	9,36	2954031	10,7	55456,07	3882,24
2016	Kota Bekasi	9,34	3327160	10,8	58831,08	4404,5
2017	Kota Bekasi	9,32	3601650	10,9	62202,01	4982,36
2018	Kota Bekasi	9,14	3915353	11,1	65845,09	5001,75
2019	Kota Bekasi	8,3	4229756	11,1	69406,53	5567,92
2020	Kota Bekasi	10,68	4589709	11,2	67619,24	4787,48
2021	Kota Bekasi	10,88	4782936	11,3	69796,94	5704,89

2022	Kota Bekasi	8,81	4.816.912	11,7	73260,65	4957,07
2015	Kota Depok	7,48	2705000	10,7	37529,48	2178,6
2016	Kota Depok	7,24	3046180	10,8	40263,23	2755,26
2017	Kota Depok	7	3297489	10,8	42981,28	2672,16
2018	Kota Depok	6,66	3584700	10,9	45978,89	2765,08
2019	Kota Depok	6,12	3872551	11	49076,58	3231,27
2020	Kota Depok	9,87	4202105	11,3	48135,93	3199,2
2021	Kota Depok	9,76	4339514	11,5	49947,24	3267,62
2022	Kota Depok	7,82	4377231	11,5	52564,98	3278,03
2015	Kota Cimahi	9	2001200	10,8	17876,44	1074,96
2016	Kota Cimahi	8,72	2275715	10,9	18882,16	1358,74
2017	Kota Cimahi	8,3	2463461	10,9	19907,13	1339,38
2018	Kota Cimahi	8	2678028	10,9	21192,6	1489,07
2019	Kota Cimahi	8,09	2893074	11	22856,04	1501,76
2020	Kota Cimahi	13,3	3139274	11	22340,56	1282,32
2021	Kota Cimahi	13,07	3241929	11,1	23275,78	1481,51
2022	Kota Cimahi	10,77	3272668	11,1	24652,73	1379,59
2015	Kota Tasikmalaya	5,46	1450000	8,56	12370,62	1534,25
2016	Kota Tasikmalaya	6,18	1641280	8,63	13225,25	1766,52
2017	Kota Tasikmalaya	6,89	1776686	9,03	14027,95	1864,8
2018	Kota Tasikmalaya	6,89	1931435	9,04	14859,11	1914,92
2019	Kota Tasikmalaya	6,78	2086529	9,13	15746,12	1920,41
2020	Kota Tasikmalaya	7,99	2264093	9,33	15430,02	1743,16
2021	Kota Tasikmalaya	7,66	2264093	9,52	15980,75	2013,49
2022	Kota Tasikmalaya	6,62	2363389	9,47	16781,04	1924,72
2015	Kota Banjar	7,38	1168000	8,06	2624,24	724,39
2016	Kota Banjar	6,68	1327965	8,19	2772,84	877,98
2017	Kota Banjar	5,97	1437522	8,59	2919,72	787,66
2018	Kota Banjar	5,95	1562730	8,6	3067,11	803,92
2019	Kota Banjar	6,16	1688217	8,62	3221,45	853,67
2020	Kota Banjar	6,73	1831884	8,63	3251,76	745,84
2021	Kota Banjar	6,09	1831884	8,77	3365,25	754,62
2022	Kota Banjar	5,53	1852009	8,86	3506,25	790,68

CAMOON EFFECT MODEL

Dependent Variable: TPT
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/13/23 Time: 11:11
 Sample: 2015 2022
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 27
 Total panel (unbalanced) observations: 213

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-30.10914	7.094427	-4.244055	0.0000
LOG(UMK)	2.974396	0.593604	5.010740	0.0000
LOG(RLS)	-1.404456	0.927538	-1.514177	0.1315
LOG(PDRB)	0.742047	0.327598	2.265116	0.0245
LOG(BPD)	-1.243759	0.522582	-2.380026	0.0182
Root MSE	1.815153	R-squared		0.295114
Mean dependent var	8.487042	Adjusted R-squared		0.281558
S.D. dependent var	2.167083	S.E. of regression		1.836840
Akaike info criterion	4.077165	Sum squared resid		701.7879
Schwarz criterion	4.156068	Log likelihood		-429.2180
Hannan-Quinn criter.	4.109052	F-statistic		21.77078
Durbin-Watson stat	0.467015	Prob(F-statistic)		0.000000

FIXED EFFECT MODEL

Dependent Variable: TPT
Method: Panel Least Squares
Date: 06/13/23 Time: 11:13
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 213

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.93217	9.097793	1.531379	0.1274
LOG(UMK)	12.47391	1.788164	6.975820	0.0000
LOG(RLS)	-16.59409	4.129882	-4.018055	0.0001
LOG(PDRB)	-13.79188	2.693498	-5.120435	0.0000
LOG(BPD)	-1.322276	1.091877	-1.211012	0.2275

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.957390	R-squared		0.803903
Mean dependent var	8.487042	Adjusted R-squared		0.771579
S.D. dependent var	2.167083	S.E. of regression		1.035722
Akaike info criterion	3.041869	Sum squared resid		195.2350
Schwarz criterion	3.531071	Log likelihood		-292.9590
Hannan-Quinn criter.	3.239571	F-statistic		24.87042
Durbin-Watson stat	0.982739	Prob(F-statistic)		0.000000

RANDOM EFFECT MODEL

Dependent Variable: TPT
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/13/23 Time: 11:43
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 216
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18.02124	6.046159	-2.980609	0.0032
LOG(UMK)	2.813503	0.711817	3.952563	0.0001
LOG(RLS)	-4.329484	1.965871	-2.202324	0.0287
LOG(PDRB)	0.868571	0.520207	1.669664	0.0965
LOG(BPD)	-1.860547	0.810202	-2.296400	0.0226

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.603210	0.7013
Idiosyncratic random		1.046385	0.2987

Weighted Statistics			
Root MSE	1.125592	R-squared	0.097789
Mean dependent var	1.901253	Adjusted R-squared	0.080685
S.D. dependent var	1.187776	S.E. of regression	1.138850
Sum squared resid	273.6628	F-statistic	5.717446
Durbin-Watson stat	1.191912	Prob(F-statistic)	0.000218

Unweighted Statistics			
R-squared	0.229072	Mean dependent var	8.455694
Sum squared resid	804.4698	Durbin-Watson stat	0.405462

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: UJIHAUSMAN
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.852481	(26,185)	0.0000
Cross-section Chi-square	279.633716	26	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: TPT
Method: Panel Least Squares
Date: 06/13/23 Time: 11:44
Sample: 2015 2022
Periods included: 8

Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 216

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.40738	7.161724	-4.106187	0.0001
LOG(UMK)	2.901689	0.603780	4.805872	0.0000
LOG(RLS)	-1.430062	0.939242	-1.522570	0.1294
LOG(PDRB)	0.812765	0.331654	2.450639	0.0151
LOG(BPD)	-1.287953	0.527356	-2.442286	0.0154
Root MSE	1.849990	R-squared		0.291570
Mean dependent var	8.455694	Adjusted R-squared		0.278140
S.D. dependent var	2.203072	S.E. of regression		1.871781
Akaike info criterion	4.114534	Sum squared resid		739.2523
Schwarz criterion	4.192666	Log likelihood		-439.3697
Hannan-Quinn criter.	4.146100	F-statistic		21.71047
Durbin-Watson stat	0.455648	Prob(F-statistic)		0.000000

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: UJIHAUSMAN
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	42.938253	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(UMK)	13.039662	2.813503	2.665523	0.0000
LOG(RLS)	-17.588491	-4.329484	13.021720	0.0002
LOG(PDRB)	-14.449948	0.868571	6.955707	0.0000
LOG(BPD)	-1.284530	-1.860547	0.545725	0.4355

Cross-section random effects test equation:
 Dependent Variable: TPT
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/13/23 Time: 11:46
 Sample: 2015 2022
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 216

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.23865	9.087253	1.566882	0.1189

LOG(UMK)	13.03966	1.781069	7.321256	0.0000
LOG(RLS)	-17.58849	4.109303	-4.280164	0.0000
LOG(PDRB)	-14.44995	2.688182	-5.375360	0.0000
LOG(BPD)	-1.284530	1.096427	-1.171560	0.2429

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.968391	R-squared	0.805885
Mean dependent var	8.455694	Adjusted R-squared	0.774407
S.D. dependent var	2.203072	S.E. of regression	1.046385
Akaike info criterion	3.060674	Sum squared resid	202.5605
Schwarz criterion	3.545089	Log likelihood	-299.5528
Hannan-Quinn criter.	3.256379	F-statistic	25.60146
Durbin-Watson stat	0.935850	Prob(F-statistic)	0.000000
